Katalog : 9302020.8105

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN ARU MENURUT PENGELUARAN 2015-2019

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
JL PEMDA I - Dobo 97662 Telp. (0917) 21606 Fax. (0917) 21606
Homepage : https://keparukab.bps.go.id Email : bps8105@bps.go.id

https://keparukab.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
MENURUT PENGELUARAN
2015-2019

https://kepartkab.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
MENURUT PENGELUARAN 2015-2019

ISBN : 978-602-0958-63-7
No. Publikasi : 81050.20.03
Katalog BPS : 9302020.8105
Ukuran Buku : 21 x 28 cm
Jumlah Halaman : x + 77 halaman

Naskah :
BPS Kabupaten Kepulauan Aru

Penyunting :
BPS Kabupaten Kepulauan Aru

Gambar Kulit :
BPS Kabupaten Kepulauan Aru

Diterbitkan oleh :
© BPS Kabupaten Kepulauan Aru

Dicetak oleh :
BPS Kabupaten Kepulauan Aru

Dilarang Mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik (UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

https://keparukab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDB/PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDB/PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran /*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB/PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor. Publikasi ini sudah menggunakan data PDRB tahun dasar 2010, dan penyempurnaan ruang lingkup serta metodologi yang mengacu pada sistem neraca nasional terbaru (*System of National Accounts/SNA 2008*).

Penyempurnaan publikasi ini terus dilakukan demi memperoleh hasil yang lebih baik, dengan demikian kritik dan saran membangun akan selalu disambut dengan tangan terbuka demi penyempurnaan publikasi selanjutnya. Kepada semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dobo, Mei 2020

Kepala BPS Kabupaten
Kepulauan Aru

Paulus Maruanaya, S.E

https://kepardukab.bps.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

I. PENDAHULUAN **3**
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3
1.2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto..... 5

II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA **9**
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga..... 9
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga 13
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah..... 16
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)..... 19
2.5. Perubahan Inventori..... 23
2.6. Ekspor-Impor..... 27

III. TINJAUAN EKONOMI **31**
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Menurut Pengeluaran..... 31
3.2. Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga..... 36
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)..... 40
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah..... 41
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto..... 43
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori..... 45
3.7. Perkembangan Ekspor..... 46
3.8. Perkembangan Impor..... 47

https://kepulukab.bps.go.id

IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN KEPULAUAN ARU MENURUT PENGELUARAN **53**

4.1. PDRB (Nominal)..... 53
4.2. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor..... 54
4.3. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)..... 55
4.4. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB..... 56
4.5. Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB..... 56
4.6. Perbandingan PDRB Terhadap Impor..... 57
4.7. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan..... 58
4.8. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)..... 59
4.9. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)..... 60

V. PENUTUP **65**

LAMPIRAN TABEL **69**

https://keparukab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1.	PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	32
Tabel 3.2.	PDRB Kabupaten Kepualuan Aru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	32
Tabel 3.3.	Distribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Aru ADHB Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	34
Tabel 3.4.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Aru ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	35
Tabel 3.5.	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	35
Tabel 3.6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	36
Tabel 3.7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	38
Tabel 3.8.	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	39
Tabel 3.9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	40
Tabel 3.10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Kepulaun Aru, Tahun 2015-2019**	41
Tabel 3.11.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulaun Aru, Tahun 2015-2019**	42
Tabel 3.12.	Struktur PMTB Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	44
Tabel 3.13.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	45
Tabel 3.14.	Perkembangan Ekspor Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	47
Tabel 3.15.	Perkembangan Impor Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	48
Tabel 4.1.	PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	54
Tabel 4.2.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, Tahun 2015-2019**	55
Tabel 4.3.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB, Tahun 2015-2019**	55
Tabel 4.4.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	56
Tabel 4.5.	Rasio Ekspor Terhadap PMTB, Tahun 2015-2019**	57
Tabel 4.6.	Rasio PDRB Terhadap Impor Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	58

https://kepulauankab.bps.go.id

Tabel 4.7.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	59
Tabel 4.8.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	60
Tabel 4.9.	*Incremental Capital Output Ratio* Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**	61

https://keparukab.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kabupaten Kepulauan Aru ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019 33

https://keparukab.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Tabel 6.1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	69
Tabel 6.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	70
Tabel 6.3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	71
Tabel 6.4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	72
Tabel 6.5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	73
Tabel 6.6.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	74
Tabel 6.7.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	75
Tabel 6.8.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru (2010=100) Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	76
Tabel 6.9.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru (2010=100) Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**	77

https://kepulaukab.bps.go.id

KANTOR BUPATI
KAB. KEPULAUAN AKU

1

PENDAHULUAN

https://keparukab.bps.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di wilayah domestik suatu negara, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi antar periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur perekonomian terkini. Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu:

https://kepularukab.bps.go.id

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah domestik suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah domestik suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; pembentukan modal tetap domestik bruto; perubahan inventori; ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

https://kepaarukab.bps.go.id

1.2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kategori lapangan usaha.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

https://kepaarukab.bps.go.id

https://keparukab.bps.go.id

2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

https://keparukab.bps.go.id

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

https://kepularukab.bps.go.id

2.1.1. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

2.1.2. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

2.1.2.1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2.1.2.2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotika
2.1.2.3. Pakaian dan alat kaki
2.1.2.4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
2.1.2.5. Furnitur, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
2.1.2.6. Kesehatan

2.1.2.7. Angkutan

2.1.2.8. Komunikasi

2.1.2.9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

2.1.2.10. Pendidikan

2.1.2.11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel

2.1.2.12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali manjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok;
2. Pakaian dan Alas Kaki;
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga;
4. Kesehatan dan Pendidikan;
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya;
6. Hotel dan Restoran;
7. Lainnya.

https://kepparukab.bps.go.id

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (o*wner occupied dwellings*);

  Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor ke wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga, contoh : pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

https://keparukab.bps.go.id

2.1.3. Penghitungan PKRT Tahunan

- **Sumber data**

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan;
- Jumlah penduduk pertengahan tahun;
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu;
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

- **Metode penghitungan**

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment)*. Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data

sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
   a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
   b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
2. Data poin ke 1 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

https://kepparukab.bps.go.id

2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

Sektor Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.1 Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *non profit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Perkumpulan Sosial/

https://kepularukab.bps.go.id

Kebudayaan/Olahraga/Hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan, dan Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

2.2.2 Cakupan

Nilai Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sama dengan nilai *output* non pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai *output* non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
c. Penyusutan.
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dll.

https://kepsrukab.bps.go.id

2.2.3. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

- **Sumber data**
  - Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
    Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
  - Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
    Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
  - Indeks Harga Konsumen (IHK)

- **Metode penghitungan**

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran;

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran;

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga;

i : Jenis lembaga LNPRT, i = 1, 2, 3, …, 7;

j : Jenis pengeluaran LNPRT, j = 1, 2, 3, …, 19.

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT Atas Dasar Harga Berlaku;

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

https://kepardkab.bps.go.id

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

https://kepularukabbps.go.id

2.3.1. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai *output* dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. Produksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan, contoh : aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Produksi jasa, contoh : aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima

dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditas (pendapatan jasa).

2.3.2. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/Kota mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; b. PK-Pemerintah Pusat yanfg merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; c. PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah bersangkutan.

https://keparukab.bps.go.id

2.3.3. Penghitungan PDRB Tahunan

- **Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten/Kota Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu);
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu);
- Statistik Keuangan Daerah (BPS);
- *Output* Bank Indonesia (BI);
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

- **Metode Penghitungan**

a. PK-P Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

PK-P ADHB =

Output non pasar – penjualan barang dan jasa + *output* Bank Indonesia

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten/Kota, PK-P Kabupaten/Kota ADHB dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten/Kota tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah Kabupaten/Kota tersebut.

https://kepariokab.bps.go.id

b. PK-P Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Pengeluaran konsumsi pemerintah adhk dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.1. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.2. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

https://kepularukab.bps.go.id

2. Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.3. Penghitungan PMTB Tahunan

- **Sumber data**

a. *Output* industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.

b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.

c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah Tangga.

d. Laporan keuangan perusahaan.

e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.

f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.

g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).

h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.

i. Publikasi Statistik Konstruksi.

j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

- **Metode penghitungan**

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai kategori ekonomi (produsen) secara langsung.

https://kepulauan.bps.go.id

Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di “*deflate”* (dibagi) dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

https://kepariukab.bps.go.id

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai *output* industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi *output* mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan

modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (ADHB) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data *output* tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di "*reflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. Pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-"*deflate*" PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

https://kepularukabbps.go.id

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

a. Rasio penggunaan *output* industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu terlalu lama.

2.5. Perubahan Inventori

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.1. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress)*, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

https://kepulauankab.bps.go.id

2.5.2. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;

f. Ternak untuk tujuan dipotong;

g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan

h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

https://keparukab.bps.go.id

2.5.3. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

- **Sumber data**

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;

- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, dan ternak dari Ditjennak Kementan untuk data pusat serta Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk data kabupaten/kota.

- **Metode Penghitungan**

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

https://kepaarukab.bps.go.id

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan: a. men*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

https://kepulukab.bps.go.id

2.6. Ekspor-Impor

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

https://kepardkab.bps.go.id

2.6.1. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non residen yang berada di luar wilayah tersebut.

2.6.2. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari :

a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut;
b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut;
c. Ekspor/impor barang dan jasa antar daerah;
   Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

2.6.3. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

- **Sumber data**
  - Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US$);
  - Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US$);
  - Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
  - Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;

- Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk provinsi dari hasil survei.

- **Metode Penghitungan**

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen.

https://keparukab.bps.go.id

3

TINJAUAN EKONOMI

https://keparukab.bps.go.id

BAB III
TINJAUAN EKONOMI

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 sampai dengan tahun 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kepulauan Aru digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah Tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

https://kepaurkab.bps.go.id

3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Menurut Pengeluaran

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Aru selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 130 766,13	1 255 565,60	1 412 120,72	1 533 376,37	1 702 083,16
2. Konsumsi LNPRT	50 866,62	54 086,96	58 283,80	63 788,14	70 336,40
3. Konsumsi Pemerintah	875 508,72	938 204,12	987 920,26	1 027 906,99	1 036 084,13
4. PMTB	724 191,35	798 197,15	894 634,79	1 011 532,56	1 119 434,95
5. Perubahan Inventori	10 092,96	10 157,86	11 161,87	12 720,23	14 277,27
6. Ekspor	530 842,30	550 303,69	585 128,82	646 771,24	722 887,14
7. Impor	703 574,29	790 795,72	913 810,29	1 043 216,45	1 188 963,51
Total PDRB	**2 618 693,78**	**2 815 719,65**	**3 035 439,97**	**3 252 879,09**	**3 476 139,55**

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

https://kepparukab.bps.go.id

Tabel 3.2. PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	771 434,63	816 081,31	866 072,76	915 172,17	972 983,86
2. Konsumsi LNPRT	40 077,63	41 452,48	43 653,69	46 079,83	49 537,30
3. Konsumsi Pemerintah	626 197,81	660 907,01	681 727,43	688 879,09	680 913,03
4. PMTB	542 088,58	580 122,32	631 011,74	692 453,08	742 613,79
5. Perubahan Inventori	8 599,22	8 614,50	8 961,61	9 657,65	10 509,89
6. Ekspor	404 148,55	413 662,87	433 846,37	462 215,06	504 286,47
7. Impor	571 407,17	604 011,15	634 917,05	661 179,09	682 225,05
Total PDRB	**1 821 139,26**	**1 916 829,33**	**2 030 356,56**	**2 153 277,79**	**2 278 619,29**

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

Selain dinilai atas dasar harga berlaku (adhb), PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (adhk) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai

dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adhk, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adhk menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2015–2019, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kepulauan Aru berdasarkan PDRB adhk dapat dilihat pada tabel 3.2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adhb, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adhk juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kabupaten Kepulauan Aru ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), Tahun 2015-2019

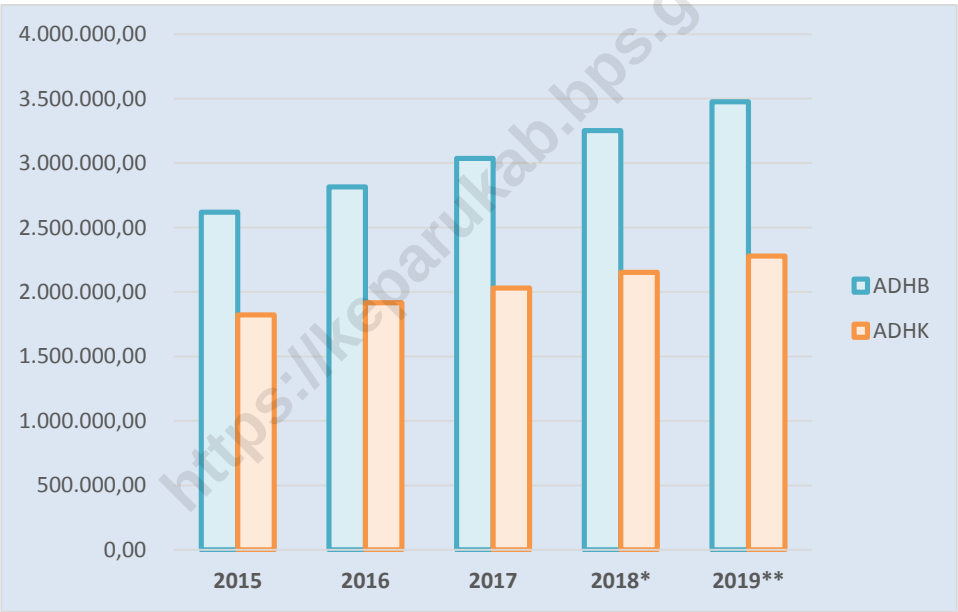

https://keparukab.bps.go.id

Dari gambar 3.1. di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannnya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Aru ADHB Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	43,18	44,59	46,52	47,14	48,96
2. Konsumsi LNPRT	1,94	1,92	1,92	1,96	2,02
3. Konsumsi Pemerintah	33,43	33,32	32,55	31,6	29,81
4. PMTB	27,65	28,35	29,47	31,1	32,20
5. Perubahan Inventori	0,39	0,36	0,37	0,39	0,41
6. Ekspor	20,27	19,54	19,28	19,88	20,80
7. Impor	26,87	28,09	30,10	32,07	34,20
Total PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepartikab.bps.go.id

Berdasarkan tabel 3.3 diatas terlihat bahwa selama periode 2015–2019, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Kabupaten Kepulauan Aru sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 40 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 19,28 s.d. 20,80 persen; demikian halnya impor masih mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 26,87 s.d. 34,20 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 27,65 s.d. 32,20 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 29,81-33,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Pada tahun 2015-2019 perdagangan Kepulauan Aru menunjukkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor yang menunjukkan dalam kondisi “defisit”.

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Aru ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,77	5,79	6,13	5,67	6,32
2. Konsumsi LNPRT	7,03	3,43	5,31	5,56	7,50
3. Konsumsi Pemerintah	12,23	5,54	3,15	1,05	-1,16
4. PMTB	5,55	7,02	8,77	9,74	7,24
5. Perubahan Inventori	-40,87	0,18	4,03	7,77	8,82
6. Ekspor	-3,11	2,35	4,88	6,54	9,10
7. Impor	2,56	5,71	6,54	4,14	3,18
Total PDRB	**5,02**	**5,25**	**5,92**	**6,05**	**5,82**

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

https://kepularukab.bps.go.id

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Aru dari tahun 2015 s.d 2019 secara rata-rata mencapai 5,61 persen, dengan masing-masing sebesar 5,02 persen (2015); 5,25 persen (2016); 5,92 persen (2017), 6,05 persen (2018) dan 5,82 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 6,05 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 (5,02 persen).

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kepulauan Aru Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(2010=100)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	146,58	153,85	163,05	167,55	174,93
2. Konsumsi LNPRT	126,92	130,48	133,51	138,43	141,99
3. Konsumsi Pemerintah	139,81	141,96	144,91	149,21	152,16
4. PMTB	133,59	137,59	141,78	146,08	150,74
5. Perubahan Inventori	117,37	117,92	124,55	131,71	135,85
6. Ekspor	131,53	133,03	134,87	139,93	143,35
7. Impor	123,13	130,92	143,93	157,78	174,28
Total PDRB	**143,79**	**146,89**	**149,50**	**151,07**	**152,55**

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

Sementara itu, indeks implisit[1] PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

3.2. Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Tabel 3.6 berikut menggambarkan rincian perkembangan penggunaan konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2015-2019, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

https://kepardkab.bps.go.id

Tabel 3.6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017*	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB *(Juta Rp)*	1 130 766,13	1 255 565,60	1 412 120,72	1 533 376,37	1 702 083,16
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	771 434,63	816 081,31	866 072,76	915 172,17	972 983,86
Proporsi Terhadap PDRB *(% ADHB)*	43,18	44,59	46,52	47,14	48,96
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun					
a. ADHB *(Juta Rp)*	12,39	13,56	15,06	16,14	17,71
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	8,45	8,82	9,24	9,63	10,12
Pertumbuhan[2]					
a. Total konsumsi RT	2,77	5,79	6,13	5,67	6,32
c. Perkapita	1,33	4,30	4,77	4,31	5,09
Jumlah Penduduk *(jiwa)*	91.277	92.578	93.780	95.005	96.114

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

Selama kurun waktu 2015-2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (adhb) maupun riil (adhk). Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju

[1] *Indeks perkembangan*

[2] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 48,96 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 43,18 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita/penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2015, secara umum setiap orang di Kabupaten Kepulauan Aru menghabiskan dana sekitar 12,39 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 13,56 juta rupiah (2016); 15,06 juta rupiah (2017); 16,14 juta rupiah (2018) ; dan menjadi 17,71 juta di tahun 2019.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru meningkat, baik secara kuantitas *(volume)* maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” berkisar antara 1,33 sampai dengan 5,09 persen. Laju pertumbuhan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 2,77 persen pada tahun 2015, kondisi ini mengalami percepatan pertumbuhan secara signfikan hingga tahun 2017 yang mencapai 6,13 persen. Seiring dengan mulai meningkatnya pendapatan masyarakat efek dari laju pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami percepatan 5,76 persen pada tahun 2017. Meningkat pada tahun 2018 yaitu pertumbuhannya sebesar 5,79 persen. Dan kembali mengalami perlambatan pada tahun 2019 sebesar 5,72 persen.

https://kepardukab.bps.go.id

Sama halnya dengan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita pun mempunyai pola yang sama. Dimana, pada tahun 2015 laju pertumbuhannya mengalami percepatan setiap tahunnya yaitu dari 1,33 persen menjadi 5,09 persen pada tahun 2019. Secara umum, peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada sekitar 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat.

Tabel 3.7. Struktur Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	27,29	28,54	30,28	31,02	32,53
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,46	1,56	1,63	1,74	1,86
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RT	4,44	4,56	4,49	4,36	4,46
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,35	4,30	4,34	4,25	4,25
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,14	2,13	2,17	2,20	2,22
f. Hotel dan Restoran	1,90	1,93	2,04	2,04	2,11
g. Lainnya	1,60	1,56	1,57	1,54	1,54
Total Konsumsi	**43,18**	**44,59**	**46,52**	**47,14**	**48,96**

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Secara rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pada tabel 3.7, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Kepulauan Aru, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung meningkat dan masih berada diatas 30 persen. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 27,29 persen (2015); 28,54 persen (2016); 32,28 persen (2017) ; 31,02 persen (2018) dan terus meningkat hingga mencapai 32,53 persen pada tahun 2019.

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Meskipun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari

perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,25	6,09	6,77	7,68	7,35
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,64	6,46	4,89	7,86	7,35
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RT	0,37	9,93	4,54	0,13	4,81
d. Kesehatan dan Pendidikan	1,66	3,80	5,44	2,34	3,31
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,76	2,45	6,07	2,55	3,71
f. Hotel dan Restoran	5,89	2,37	4,99	4,41	6,96
g. Lainnya	1,24	3,17	4,85	1,26	2,63
Total Konsumsi	**2,77**	**5,79**	**6,13**	**5,67**	**6,32**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Dilihat dari pertumbuhan "riil" nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman dan rokok menunjukkan peningkatan sebesar 3,25 persen (2015); 6,09 persen (2016); 6,77 persen (2017); 7,68 persen (2018) dan 7,35 persen (2019). Pertumbuhan "riil" ini menunjukan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 3.9, menunjukan pertumbuhan implisit yang fluktuatif setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman dan rokok sebesar 7,63 persen (2015); 6,02 persen (2016); 7,12 persen (2017); 1,94 persen (2018) dan pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan harga dengan laju pertumbuhan implisitnya sebesar 4,41 persen. Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki juga mengalami penurunan dari 8,74 persen (2015) menjadi 5,52 persen pada tahun 2018, kemudian kenaikan harga

kembali terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,54 persen. Pada tahun 2019, harga kelompok pakaian dan alas kaki meningkat lebih tinggi dari kelompok konsumsi lainnya.

Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,63	6,02	7,12	1,94	4,41
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,74	7,77	7,47	5,52	6,54
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan RT	8,34	0,31	1,59	3,87	4,40
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,58	2,57	3,09	2,61	3,45
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,76	4,64	3,15	5,95	4,11
f. Hotel dan Restoran	5,40	6,65	8,73	2,33	3,27
g. Lainnya	4,97	1,86	3,27	4,17	3,56
Total Konsumsi	**7,10**	**4,96**	**5,98**	**2,76**	**4,41**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor seperti yang terlihat pada tabel 3.10.

Proporsi LNPRT Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2015-2019 berkisar antara 1,92 persen hingga 2,02 persen. Meskipun mengalami peningkatan secara absolut, namun proporsi komponen ini menunjukan fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh pertambahan yang terjadi pada komponen pengeluaran lainnya. Tercatat pada tabel 3.10 di bawah bahwa pada tahun 2019 nilai konsumsi akhir LNPRT kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB *(Juta Rp)*	50 866,62	54 086,96	58 283,80	63 788,14	70 336,40
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	40 077,63	41 452,48	43 653,69	46 079,83	49 537,30
Laju Pertumbuhan	7,03	3,43	5,31	5,56	7,50
Proporsi Terhadap PDRB *(% ADHB)*	1,94	1,92	1,92	1,96	2,02

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepulauan.bps.go.id

3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Aru serta perkembangannya dapat dilihat pada tabel 3.11. Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 875 milyar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 1,03 triliyun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun di mana sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2019 yakni 29,81 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 33,43 persen.

Tabel 3.11. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB *(Juta Rp)*	875 508,72	938 204,12	987 920,26	1 027 906,99	1 036 084,13
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	626 197,81	660 907,01	681 727,43	688 879,09	680 913,03
Proporsi Terhadap PDRB *(% ADHB)*	33,43	33,32	32,55	31,6	32,20
Pertumbuhan[3]					
Total konsumsi pemerintah	12,23	5,54	3,15	1,05	-1,16
Jumlah Penduduk *(ribu jiwa)*	91 277	92 578	93 780	95 005	96 114

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepulauanab.bps.go.id

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun jika dilihat adh Konstan 2010, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2015, mengalami percepatan yang cukup signifikan, dimana laju pertumbuhannya mencapai 12,23 persen pada tahun 2015. Hal tersebut erat kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada serentak untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Aru pada tahun 2015 yang tentu akan berdampak pada belanja pemerintah daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Namun, setelah masa penyelenggaraan pilkada selesai, pertumbuhan konsumsi pemerintah baik secara total maupun perkapita menglami perlambatan yang sangat signfikan yaitu, tahun 2015 sebesar 12,23 persen menjadi 1,05 persen (2018) dan mengalami penurunan mencapai -1,16 persen pada tahun 2019.

[3] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)[4]. Fungsi kapital adalah sebagai *input* tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 3.12. menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 secara keseluruhan pertumbuhan PMTB fluktuatif, laju pertumbuhan ekonomi PMTB pada Tahun 2015 sebesar 5,55 persen, mengalami percepatan hingga pada tahun 2018 sebesar 9,74 persen namun mengalami perlambatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,24 persen. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Subkomponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan di sektor bangunan dan non bangunan pada periode 2015-2019 memiliki pola yang relatif sama.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2015–2019 (tabel 3.12). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing subkomponen PMTB tersebut. Pertumbuhan "riil" subkomponen non bangunan pada tahun 2015 sebesar 5,46 persen, terus mengalami percepatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 9,25 persen pada tahun 2018. Namun, mengalami perlambatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 hingga mencapai 5,84 persen.

https://kepakab.bps.go.id

[4] *Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor*

Tabel 3.12. Struktur PMTB Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB *(Juta Rp)*	724 191,35	798 197,15	894 634,79	1 011 532,56	1 119 434,95
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	542 088,58	580 122,32	631 011,74	692 453,08	742 613,79
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	27,65	28,35	29,47	31,1	32,20
Struktur PMTB [5]					
a. Bangunan *(Juta Rp)*	518 963,50	570 146,56	640 490,26	727 232,40	814 536,20
(%)	71,66	71,43	71,59	71,89	72,76
b. Non Bangunan *(Juta Rp)*	205 227,85	228 050,59	254 144,53	284 300,17	304 898,76
(%)	28,34	28,57	28,41	28,11	27,24
Total PMTB *(Juta Rp)*	724 191,35	798 197,15	894 634,79	1 011 532,56	1 119 434,95
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan [6] (%)					
a. Bangunan	5,59	6,92	9,42	9,96	7,88
a. Non Bangunan	5,46	7,22	7,38	9,25	5,84
Total PMTB	5,55	7,02	8,77	9,74	7,24

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepardukab.bps.go.id

Sama halnya dengan pola subkomponen non bangunan, subkomponen bangunan pun menunjukkan pola yang sama. Adapun pertumbuhan subkomponen ini pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 masing-masing berturut-turut 5,59 persen; 6,92 persen; 9,96 persen; dan 7,88 persen.

Adapun secara umum, selama kurun waktu tahun 2015-2019 pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai besaran angka 9,74 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,55 persen.

[5] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)*
[6] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

3.6. Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB *(Juta Rp)*	10 092,96	10 157,86	11 161,87	12 720,23	14 277,27
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	8 599,22	8 614,50	8 961,61	9 657,65	10 509,89
Proporsi Terhadap PDRB *(% ADHB)*	**0,39**	**0,36**	**0,37**	**0,39**	**0,41**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepparukab.bps.go.id

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsinya dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2015 perubahan inventori sebesar 10.092,96 juta rupiah, terus meningkat menjadi 14.277,27 juta rupiah (2019). Rasio perubahan inventori terhadap PDRB

Kabupaten Kepulauan Aru selama lima tahun terakhir relatif berfluktuasi. Rata-rata rasio inventori terhadap PDRB berkisar antara 0,36 hingga 0,41 persen.

3.7. Perkembangan Ekspor

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar, baik itu luar daerah maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Komponen ekspor memiliki peranan yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut dapat dilihat dari peranannya terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Aru secara rata-rata mencapai lebih dari 20 persen setiap tahunnya. Komoditas ekspor Kabupaten Kepulauan Aru adalah komoditas perikanan, kopra, dan alat angkutan laut. Akan tetapi yang paling mendominasi adalah komoditas perikanan. Hal tersebut memang wajar, sebagai wilayah kepulauan dimana sebagian besar wilayahnya merupakan perairan berdampak pada melimpahnya hasil laut di Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut mendorong kegiatan pendistribusian hasil laut (komoditas perikanan) ke luar Kabupaten Kepulauan Aru, baik itu luar daerah bahkan sampai luar negeri. Bahkan dengan sangat melimpahnya hasil perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru menarik berbagai investor asing untuk membuka perusahaan-perusahaan di kabupaten ini.

https://kepulukab.bps.go.id

Adapun secara umum, selama periode 2015-2019 nilai ekspor Kabupaten Kepulauan Aru cukup berfluktuasi. Pada tahun 2015, nilai ekspor adh Berlaku adalah sebesar 550,30 milyar rupiah lalu pada tahun 2019 naik menjadi 727,89 milyar rupiah. Sama halnya dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 pun cukup berfluktuasi. Pada tahun 2015, nilai ekspor adh Konstan 2010 yaitu sebesar 404,148 milyar, kemudian meningkat menjadi 504,28 milyar rupiah pada 2019. Adapun untuk laju pertumbuhan ekspor mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pertumbuhan nilai ekspor pada tahun 2015 yang mengalami penurunan atau bertanda negatif dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar -3,11 persen disebabkan oleh beberapa perusahaan besar dibidang perikanan tutup sementara (tidak beroperasi). kemudian pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi mengalami

percepatan dengan nilai sebesar 2,35 persen; dan 4,88 persen pada tahun 2017 hingga mencapai 9,10 persen pada tahun 2019

.

Tabel 3.14. Perkembangan Ekspor Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017*	2018**	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB *(Juta Rp)*	530 842,30	550 303,70	585 128,82	646 771,24	722 887,14
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	404 148,55	413 662,87	433 846,37	462 215,06	504 286,47
Proporsi Terhadap PDRB *(% ADHB)*	20,27	19,54	19,28	19,88	20,80
Pertumbuhan[7] (%)	(3,11)	2,35	4,88	6,54	9,10

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

3.8. Perkembangan Impor

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB ekspor dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan adanya tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan suatu wilayah terhadap ekonomi atau produk wilayah maupun negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa

[7] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)*

secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Kepulauan Aru di luar daerah dan luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Adapun perkembangan impor di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15. Perkembangan Impor Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB *(Juta Rp)*	703 574,29	790 795,72	913 810,29	1 043 216,45	1 188 963,51
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	571 407,17	604 011,15	634 917,05	611 179,09	682 225,05
Proporsi Terhadap PDRB *(% ADHB)*		28,09	30,10	32,07	34,20
Pertumbuhan[8] (%)		5,71	5,12	4,14	3,18
Laju implisit [9](%)		6,33	9,93	9,63	10,46

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Sama halnya seperti ekspor, impor pun mengalami peranan yang cukup besar terhadap PDRB pengeluaran Kabupaten Kepulauan Aru. Hal ini terlihat dari peranannya terhadap PDRB ADHB yang nilainya selalu di atas 20 persen setiap tahunnya dan selalu lebih besar dari peranan ekspor. Komoditas impor Kabupaten Kepulauan Aru adalah berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hampir sebagian besar kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru merupakan barang impor terutama untuk komoditas peternakan (telur, daging, dsb.), komoditas pertanian (buah-buahan) serta komoditas-komoditas hasil industri.

Pada tahun 2015, nilai PDRB Impor adh Berlaku adalah sebesar 703,57 milyar rupiah. Nilai ini terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 yang mencapai 1.188,96 milyar rupiah. Sama halnya dengan adh Berlaku, nilai PDRB adh Konstan pada tahun 2015 sampai dengan pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 682,22 milyar rupiah. Laju pertumbuhan impor dari tahun 2015 mengalami perlambatan hingga

[8] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)*
[9] *Diturunkan dari indeks harga implisit*

tahun 2019. Laju pertumbuhan impor pada tahun 2016 adalah sebesar 5,71 persen, terus mengalami perlambatan hingga menjadi 3,18 pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa ketergantungan kebutuhan produk impor semakin berkurang dalam 5 tahun terakhir ini, sebaliknya, pertumbuhan ekspor mengalami percepatan yang signfikan. Adapun untuk laju implisit impor selama periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Laju implisit pada tahun 2015 adalah sebesar 6,33 persen, kemudian mengalami percepatan sampai mencapai angka 10,46 persen pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa harga barang-barang impor masih mengalami peningkatan setiap tahunnya.

https://keparukab.bps.go.id

https://keparukab.bps.go.id

4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KEPULAUAN ARU

https://keparukab.bps.go.id

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN KEPULAUAN ARU MENURUT PENGELUARAN

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

https://kepularukab.bps.go.id

4.1. PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 4.1.), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kepulauan Aru rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan perkapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 3,54 hingga 4,60 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,17 persen hingga 1,43 persen setiap

tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara "riil" tetapi juga terjadi secara kualitas.

Tabel 4.1. PDRB dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB *(Juta Rp)*					
a. ADHB	2 618 693,78	2 815 719,65	3 035 439,97	3 252 879,09	3 476 139,55
b. ADHK 2010	1 821 139,26	1 916 829,33	2 030 356,56	2 153 277,79	2 278 619,29
PDRB Per Kapita *(Juta Rp)*					
a. ADHB	28 689 525,10	30 414 565,59	32 367 668,73	34 239 030,42	31 581 663,17
b. ADHK 2010	19 951 786,93	20 705 019,86	21 650 208,61	22 664 889,12	23 707 465,01
Laju PertumbuhanADHK 2010 (%)	5,02	5,25	5,92	6,05	5,82
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010 (%)	3,54	3,78	4,57	4,69	4,60
Jumlah Penduduk (*jiwa)*	91 277	92 578	93 780	95 005	96 114
Pertumbuhan Penduduk (%)	1,42	1,43	1,30	1,31	1,17

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepartikab.bpsntt.id

4.2. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk (barang maupun jasa) yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk (barang maupun jasa) yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Kepulauan Aru (sekitar 40 persen), yang menandakan bahwa sebagian besar produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun didalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor. Selama periode tahun 2015-2019, total konsumsi rumah tangga selalu lebih besar daripada nilai total ekspor dengan nilai rasio pada kisaran 2 (total konsumsi rumah tangga lebih besar dua kali lipat dari total ekspor).

Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT *(Juta Rp)*	1 130 766,13	1 255 565,60	1 412 120,72	1 533 376,37	1 702 083,16
Total Ekspor *(Juta Rp)*	530 842,30	550 303,69	585 128,82	646 771,24	722 887,14
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor	**2,13**	**2,28**	**2,41**	**2,37**	**2,35**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

4.3. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kepulauan Aru digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB tahun 2015 hingga 2019 berkisar dari 1,56 pada tahun 2015 mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 1,52. Hal ini menggambarkan bahwa total konsumsi barang modal tetap bruto mulai mengalami sedikit penurunan dibandingkan konsumsi rumah.

https://kepulauankab.bps.go.id

Tabel 4.3. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT *(Juta Rp)*	1 130 766,13	1 255 565,60	1 412 120,72	1 533 376,37	1 702 083,16
Total PMTB *(Juta Rp)*	724 191,35	798 197,15	894 634,79	1 011 532,56	1 119 434,95
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	**1,56**	**1,57**	**1,58**	**1,52**	**1,52**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

4.4. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) *(Juta Rp)*					
a. Rumah Tangga	1 130 766,13	1 255 565,60	1 412 120,72	1 533 376,37	1 702 083,16
b. LNPRT	50 866,62	54 086,96	58 283,80	63 788,14	70 336,40
c. Pemerintah	875 508,72	938 204,12	987 920,26	1 027 906,99	1 036 084,13
Jumlah	2 057 141,47	2 247 856,68	2 458 324,77	2 625 071,50	2 808 503,69
PDRB (ADHB)	2 618 693,78	2 815 719,65	3 035 439,97	3 252 879,09	3 476 139,55
Proporsi	**78,56**	**79,83**	**80,99**	**80,70**	**80,79**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepartnab.bps.go.id

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 80 persen). Konsumsi akhir meningkat setiap tahunnya, begitupun proporsinya terhadap PDRB. Adapun proporsi konsumsi akhir pada tahun 2015-2019 berturut-turut adalah 78,56 persen; 79,83 persen; 80,99 persen; 80,70 persen dan 80,79 persen. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5. Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, baik itu antar daerah maupun ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan

kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 4.5. Rasio Ekspor Terhadap PMTB, Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) *(Juta Rp)*	530 842,30	550 303,69	585 128,82	646 771,24	722 887,14
Total PMTB (ADHB) *(Juta Rp)*	724 191,35	798 197,15	894 634,79	1 011 532,56	1 119 434,95
Rasio Ekspor terhadap PMTB	**0,73**	**0,69**	**0,65**	**0,64**	**0,65**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepulauankab.bps.go.id

Pada tahun 2015 rasio ekspor terhadap PMTB bernilai 0,73. Nilai PMTB pada tahun tersebut lebih besar dari nilai ekspor-nya. Begitupula pada periode-periode selanjutnya, nilai ekspor memang selalu lebih rendah dari PMTB (**tabel 4.5.**), akan tetapi nilai rasionya cenderung menurun setiap tahunnya. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut diantaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6. Perbandingan PDRB Terhadap Impor

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 4.6. menunjukkan keterbandingan antara PDRB Kabupaten Kepulauan Aru terhadap impor di kabupaten ini. Rasio PDRB terhadap impor tahun 2015 adalah sebesar 3,72. Nilai rasio PDRB terhadap impor memang cukup berfluktuatif setiap tahunnya, akan

tetapi nilai rasio tersebut cenderung masih berada pada *range* angka tiga. Penurunan nilai rasio lebih disebabkan oleh peningkatan PDRB, sedangkan nilai impor justru menurun. Adapun peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

Tabel 4.6. Rasio PDRB Terhadap Impor
Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) *(Juta Rp)*	2 618 693,78	2 815 719,65	3 035 439,97	3 252 879,09	3 476 139,55
Total Impor (ADHB) *(Juta Rp)*	703 574,29	790 795,72	913 810,29	1 043 216,45	1 188 963,51
Ratio PDRB terhadap Impor	3,72	3,56	3,32	2,97	2,92

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepularukab.bps.go.id

4.7. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 2.618,69 miliar rupiah (2015); 2.815,72 miliar rupiah (2016); 3.035,44 miliar (2017); 3.252,88 miliar (2018) dan 3.476,14 miliar (2019). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing sebesar 703,57 miliar rupiah (2015); 790,79 miliar rupiah (2016); 913,81 miliar (2017); 1.043,22 miliar (2018) dan 1.188,96 miliar rupiah (2019).

Tabel 4.7. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) *(Juta Rp)*	2 618 693,78	2 815 719,65	3 035 439,97	3 252 879,09	3 476 139,55
%	78,82	78,07	76,86	75,72	74,51
Total Nilai Impor (ADHB) *(Juta Rp)*	703 574,29	790 795,72	913 810,29	1 043 216,45	1 188 963,51
%	21,18	21,93	23,14	22,28	25,49
Total Permintaan Akhir [1]	**3 322 268,07**	**3 606 515,37**	**3 949 250,26**	**4 296 095,53**	**4 665 103,06**
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepartukab.bps.go.id

4.8. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar daerah maupun luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai **"Ekspor Neto"**,apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2015-2019, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Aru dengan luar negeri dan antar daerah, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini

[1] *Termasuk diskrepansi statistik*

menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Aru selalu dalam posisi defisit. Nilai impor yang lebih besar dari ekspor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Defisit perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru yang terjadi antara tahun 2015 sampai dengan 2019 tercatat masing-masing sebesar 172,73 miliar rupiah (2015); 240,49 miliar rupiah (2016); 328,68 miliar rupiah (2017); 396,44 miliar rupiah (2018) dan 466,08 miliar rupiah (2019).

Tabel 4.8. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) *(Juta Rp)*	530 842,30	550 303,69	585 128,82	646 771,24	722 887,14
Nilai Impor (ADHB) *(Juta Rp)*	703 574,29	790 795,72	913 810,29	1 043 216,45	1 188 963,51
Net Ekspor (X – M) *(Juta Rp)*	-172 731,99	-240 492,03	-328 681,47	-396 445,21	-466 076,37
Ratio Ekspor terhadap Impor	**0,75**	**0,70**	**0,64**	**0,62**	**0,61**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://kepartukab.bps.go.id

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung menurun dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 rasionya sebesar 0,75 kemudian menurun menjadi 0,61 pada tahun 2019.

4.9. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai *output* (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit.

Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = *Output* tahun ke t

Y_{t-1} = *Output* tahun ke t-1

https://kepulukab.bps.go.id

Data dibawah menunjukkan besaran ICOR Kabupaten Kepulauan Aru pada periode 2015-2019 berfluktuatif dimana pada tahun 2015, nilai ICOR-nya adalah sebesar 6,23. Angka ini menjadi nilai tertinggi selama 2015-2019. Nilai ICOR kembali mengalami penurunan hingga mencapai 5,92. Menurunnya angka ICOR ini menunjukkan semakin kecilnya penambahan kapital yang dibutuhkan untuk menambah satu unit nilai *output* (keluaran).

Tabel 4.9. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)
Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) *(Juta Rp)*	1 821 139,26	1 916 829,33	2 030 356,56	2 153 277,79	2 278 619,29
Perubahan *(Juta Rp)*	86 987,25	95 690,07	113 527,23	122 921,23	125 341,50
PMTB (ADHK 2010) *(Juta Rp)*	542 088,58	580 122,32	631 011,74	692 453,08	742 613,79
ICOR	**6,23**	**6,06**	**5,56**	**5,63**	**5,92**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

5

PENUTUP

https://keparukab.bps.go.id

BAB V
PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dll.), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

3. Data dapat disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb.) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

https://kepardkab.bps.go.id

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri dan antar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru terhadap ekonomi daerah lain dan negara lain *(rest of the world*).

https://keparukab.bps.go.id

LAMPIRAN TABEL

https://keparukab.bps.go.id

Tabel 6.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017*	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga	**1 130 766,13**	**1 255 565,60**	**1 412 120,72**	**1 533 376,37**	**1 702 083,16**
2. Pengeluran Konsumsi LNPRT	**50 866,62**	**54 086,96**	**58 283,80**	**63 788,14**	**70 336,40**
3. Pengeluran Konsumsi Pemerintah	**875 508,72**	**938 204,12**	**987 920,26**	**1 027 906,99**	**1 036 084,13**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**724 191,35**	**798 197,15**	**894 634,79**	**1 011 532,56**	**1 119 434,95**
5. Perubahan Inventori	**10 092,96**	**10 157,86**	**11 161,87**	**12 720,23**	**14 277,27**
6. Ekspor	**530 842,30**	**550 303,69**	**585 128,82**	**646 771,24**	**722 887,14**
7. Impor	**703 574,29**	**790 795,72**	**913 810,29**	**1 043 216,45**	**1 188 963,51**
PDRB	**2 618 693,78**	**2 815 719,65**	**3 035 439,97**	**3 252 879,09**	**3 476 139,55**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Tabel 6.2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga	**771 434,63**	**816 081,31**	**866 072,76**	**915 172,17**	**972 983,86**
2. Pengeluran Konsumsi LNPRT	**40 077,63**	**41 452,48**	**43 653,69**	**46 079,83**	**49 537,30**
3. Pengeluran Konsumsi Pemerintah	**626 197,81**	**660 907,01**	**681 727,43**	**688 879,09**	**680 913,03**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**542 088,58**	**580 122,32**	**631 011,74**	**692 453,08**	**742 613,79**
5. Perubahan Inventori	**8 599,22**	**8 614,50**	**8 961,61**	**9 657,65**	**10 509,89**
6. Ekspor	**404 148,55**	**413 662,87**	**433 846,37**	**462 215,06**	**504 286,47**
7. Impor	**571 407,17**	**604 011,15**	**634 917,05**	**661 179,09**	**682 225,05**
PDRB	**1 821 139,26**	**1 916 829,33**	**2 030 356,56**	**2 153 277,79**	**2 278 619,29**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Tabel 6.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga	**43,18**	**44,59**	**46,52**	**47,14**	**48,96**
2. Pengeluran Konsumsi LNPRT	**1,94**	**1,92**	**1,92**	**1,96**	**2,02**
3. Pengeluran Konsumsi Pemerintah	**33,43**	**33,32**	**32,55**	**31,60**	**29,81**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**27,65**	**28,35**	**29,47**	**31,10**	**32,20**
5. Perubahan Inventori	**0,39**	**0,36**	**0,37**	**0,39**	**0,41**
6. Ekspor	**20,27**	**19,54**	**19,28**	**19,88**	**20,80**
7. Impor	**26,87**	**28,09**	**30,10**	**32,07**	**34,20**
PDRB	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Tabel 6.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga	**42,36**	**42,57**	**42,66**	**42,50**	**42,70**
2. Pengeluran Konsumsi LNPRT	**2,20**	**2,16**	**2,15**	**2,14**	**2,17**
3. Pengeluran Konsumsi Pemerintah	**34,38**	**34,48**	**33,58**	**31,99**	**29,88**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**29,77**	**30,26**	**31,08**	**32,16**	**32,59**
5. Perubahan Inventori	**0,47**	**0,45**	**0,44**	**0,45**	**0,46**
6. Ekspor	**22,19**	**21,58**	**21,37**	**21,47**	**22,13**
7. Impor	**31,38**	**31,51**	**31,27**	**30,71**	**29,94**
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Tabel 6.5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Tahun 2016-2019**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga	**5,79**	**6,13**	**5,67**	**6,32**
2. Pengeluran Konsumsi LNPRT	**3,43**	**5,31**	**5,56**	**7,50**
3. Pengeluran Konsumsi Pemerintah	**5,54**	**3,15**	**1,05**	**(1,16)**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**7,02**	**8,77**	**9,74**	**7,24**
5. Perubahan Inventori	**0,18**	**4,03**	**7,77**	**8,82**
6. Ekspor	**2,35**	**4,88**	**6,54**	**9,10**
7. Impor	**5,71**	**5,12**	**4,14**	**3,18**
PDRB	**5,25**	**5,92**	**6,05**	**5,82**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Tabel 6.6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(2010=100)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga	184,72	205,10	230,68	250,49	278,04
2. Pengeluran Konsumsi LNPRT	166,32	176,85	190,58	208,58	229,99
3. Pengeluran Konsumsi Pemerintah	213,12	228,39	240,49	250,22	252,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	235,84	259,94	291,35	329,41	364,55
5. Perubahan Inventori	85,00	85,55	94,01	107,13	120,24
6. Ekspor	172,46	178,78	190,10	210,12	234,85
7. Impor	212,00	238,28	275,34	314,34	358,25
PDRB	194,21	208,82	225,11	241,24	257,80

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Tabel 6.7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(2010=100)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga	**126.02**	**133.31**	**141.48**	**149.50**	**158.94**
2. Pengeluran Konsumsi LNPRT	**131.05**	**135.54**	**142.74**	**150.67**	**161.98**
3. Pengeluran Konsumsi Pemerintah	**152.44**	**160.88**	**165.95**	**167.69**	**165.75**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**176.54**	**188.92**	**205.49**	**225.50**	**241.84**
5. Perubahan Inventori	**72.42**	**72.55**	**75.47**	**81.34**	**88.51**
6. Ekspor	**131.30**	**134.39**	**140.95**	**150.17**	**163.83**
7. Impor	**172.17**	**182.00**	**191.31**	**199.22**	**205.56**
PDRB	**135.06**	**142.15**	**150.57**	**159.69**	**168.99**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Tabel 6.8. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru (2010=100) Menurut Pengeluaran, Tahun 2015-2019**

(2010=100)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga	**146,58**	**153,85**	**163,05**	**167,55**	**174,93**
2. Pengeluran Konsumsi LNPRT	**126,92**	**130,48**	**133,51**	**138,43**	**141,99**
3. Pengeluran Konsumsi Pemerintah	**139,81**	**141,96**	**144,91**	**149,21**	**152,16**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**133,59**	**137,59**	**141,78**	**146,08**	**150,74**
5. Perubahan Inventori	**117,37**	**117,92**	**124,55**	**131,71**	**135,85**
6. Ekspor	**131,35**	**133,03**	**134,87**	**139,93**	**143,35**
7. Impor	**123,13**	**130,92**	**143,93**	**157,78**	**174,28**
PDRB	**143,79**	**146,89**	**149,50**	**151,07**	**152,55**

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

Tabel 6.9. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Aru (2010=100) Menurut Pengeluaran, Tahun 2016-2019**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	201*	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga	**4,96**	**5,98**	**2,76**	**4,41**
2. Pengeluran Konsumsi LNPRT	**2,80**	**2,33**	**3,68**	**2,57**
3. Pengeluran Konsumsi Pemerintah	**1,53**	**2,08**	**2,97**	**1,97**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**2,99**	**3,04**	**3,03**	**3,19**
5. Perubahan Inventori	**0,46**	**5,63**	**5,75**	**3,14**
6. Ekspor	**1,28**	**1,38**	**3,75**	**2,44**
7. Impor	**6,33**	**9,93**	**9,63**	**10,46**
PDRB	**2,16**	**1,78**	**1,05**	**0,99**

***** *Angka Sementara*
****** *Angka Sangat Sementara*

https://keparukab.bps.go.id

https://keparukab.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://keparukab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

JL PEMDA I - Dobo 97662 Telp. (0917) 21606 Fax. (0917) 21606
Homepage : https://keparukab.bps.go.id Email : bps8105@bps.go.id

ISBN 978-602-0958-63-7